

**TRANSFORMASI HUKUM ADMINISTRASI DI
ERA DIGITAL TANTANGAN DAN PELUANG
UNTUK PEMERINTAHAN YANG
TRANSPARAN DI KOTA PROBOLINGGO**

Satunggale Kurniawan¹

Universitas Wijaya Putra, Surabaya, Indonesia

e-mail: satunggalekurniawan@uwp.ac.id

Diterima tgl : 04-03-2025 Direvisi tgl : 10-04-2025 Disetujui tgl : 01-05-2025

DOI : 10.70656/jolasos.v2i1.249

Abstract

The transformation of administrative law in the digital era presents challenges and opportunities for transparent governance. The development of information and communication technology has changed the way government administration provides services to the public. Digitalization of public administration not only enhances bureaucratic efficiency and effectiveness but also demands legal reforms to ensure accountability and the protection of citizens' rights. This study aims to analyze the impact of administrative law transformation in the digital era on government transparency and identify emerging challenges and opportunities. By understanding these changes, this research seeks to provide policy recommendations for creating a more transparent and accountable administrative system. The research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through literature studies, analysis of legal regulations, and interviews with legal and public administration experts. The findings were then evaluated based on administrative law theories and the principles of good governance. indicate that the digitalization of government administration significantly contributes to increased transparency, efficiency, and accountability. However, several challenges must be addressed, such as data protection, digital divide, and resistance to change within the bureaucracy. Therefore, adaptive regulations and supportive policies are needed to ensure justice, openness, and public participation in governance.

Keywords: Administrative Law, Digitalization, Government Transparency, Legal Reform, Accountability.

Abstrak

Transformasi hukum administrasi di era digital membawa tantangan dan peluang bagi pemerintahan yang transparan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara administrasi pemerintahan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Digitalisasi administrasi publik tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi, tetapi juga menuntut

reformasi hukum guna memastikan akuntabilitas serta perlindungan hak-hak warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak transformasi hukum administrasi di era digital terhadap transparansi pemerintahan serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul. Dengan memahami dinamika perubahan ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang sesuai untuk menciptakan sistem administrasi yang lebih transparan dan akuntabel. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, analisis dokumen peraturan perundang-undangan, serta wawancara dengan para pakar hukum dan administrasi publik. Hasil analisis kemudian dievaluasi dengan teori hukum administrasi dan prinsip-prinsip good governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi pemerintahan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti perlindungan data pribadi, kesenjangan digital, serta resistensi terhadap perubahan dalam sistem birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang adaptif dan kebijakan yang mendukung transformasi hukum administrasi agar dapat menjamin keadilan, keterbukaan, dan partisipasi publik dalam pemerintahan.

Kata Kunci: Hukum Administrasi, Digitalisasi, Transparansi Pemerintahan, Reformasi Hukum, Akuntabilitas.

PENDAHULUAN

Hukum administrasi merupakan cabang hukum yang mengatur tentang hubungan antara pemerintah dan warga negara, yang melibatkan tindakan administratif, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun badan publik lainnya. Hukum administrasi berfungsi untuk mengontrol tindakan pemerintah dalam mengelola dan memberikan layanan kepada masyarakat. Namun, dengan perkembangan teknologi digital yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah di berbagai wilayah, termasuk di Kota Probolinggo, menghadapi tantangan baru dalam menyesuaikan kebijakan dan proses administratif mereka dengan perubahan zaman ini. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie (2016), seorang pakar hukum tata negara, transformasi digital dalam administrasi pemerintahan membuka peluang besar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa agar transformasi ini berjalan dengan baik, diperlukan adanya regulasi yang tegas dan sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan teknologi. Dalam konteks e-Government, ia berpendapat bahwa pemerintah harus memastikan adanya keselarasan antara kebijakan yang diterapkan dengan hak asasi manusia, terutama dalam hal privasi data pribadi.

Transformasi hukum administrasi di era digital tidak hanya mengarah pada penyederhanaan dan efisiensi birokrasi, tetapi juga membuka peluang besar untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif. Di era digital, pemerintah memiliki potensi untuk memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat proses administrasi. Namun, di sisi lain, era digital juga membawa tantangan tersendiri, terutama dalam hal perlindungan data pribadi, kesenjangan digital, dan perubahan struktur kelembagaan yang diperlukan untuk mendukung transisi ini. Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo (2018), seorang ahli hukum tata negara, menyatakan bahwa digitalisasi pemerintahan memberikan peluang bagi masyarakat untuk lebih terlibat dalam pengawasan dan pembuatan kebijakan publik. Ia berpendapat bahwa hal ini akan mendorong pemerintah untuk lebih akuntabel. Namun, ia juga menekankan perlunya perhatian terhadap masalah hukum yang timbul akibat digitalisasi, terutama yang berkaitan dengan hak privasi dan hak akses terhadap data publik.

Di Kota Probolinggo, penerapan teknologi dalam sistem administrasi pemerintahan sudah mulai dilakukan, namun masih banyak kendala yang harus diatasi. Pemerintah Kota Probolinggo berupaya untuk menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-Government), namun tidak terhindar dari berbagai tantangan yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai bagaimana transformasi hukum administrasi di era digital ini dapat meningkatkan transparansi pemerintahan di Kota Probolinggo serta menganalisis peluang dan tantangannya. Peluang Peningkatan Transparansi Era digital memberikan peluang besar bagi pemerintah untuk lebih transparan dalam menjalankan fungsi administratifnya. Penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi e-Government dan sistem pengawasan berbasis digital, memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi mengenai kebijakan dan tindakan administratif secara langsung. Hal ini memperkecil kemungkinan terjadinya praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses administratif. Sebagai contoh, di Kota Probolinggo, penerapan sistem e-Budgeting dan e-Procurement dapat mempermudah pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran dan proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah kota. Prof. Dr. Kadarusman (2020), seorang pakar hukum administrasi, menyatakan bahwa penerapan sistem e-Government di Indonesia membawa potensi untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. Namun, ia juga menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan teknologi tersebut. Sistem yang efektif tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga pada kesiapan aparatur pemerintahan untuk menjalankan sistem digital yang ada.

Pengelolaan Data dan Perlindungan Data Pribadi Salah satu tantangan utama dalam transformasi hukum administrasi di era digital adalah pengelolaan dan perlindungan data pribadi. Seiring dengan digitalisasi proses administratif, data pribadi warga negara yang dikelola oleh pemerintah harus dilindungi dengan baik agar tidak disalahgunakan. Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yang baru-baru ini disahkan di Indonesia menjadi langkah penting untuk melindungi privasi individu. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan bahwa semua sistem digital yang diterapkan dapat mematuhi ketentuan yang ada dalam undang-undang ini. Di Kota Probolinggo, pemanfaatan sistem administrasi berbasis elektronik harus sejalan dengan upaya perlindungan data pribadi, mengingat banyaknya data pribadi warga yang dikelola oleh pemerintah. Dr. Tuti S. Pratomo (2019), pakar hukum administrasi publik, berpendapat bahwa salah satu keuntungan utama dari transformasi digital dalam pemerintahan adalah peningkatan transparansi, yang memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengawasi kebijakan dan keputusan pemerintah. Namun, ia juga mencatat tantangan dalam hal keberlanjutan dan perlindungan data pribadi yang terkumpul dalam sistem digital. Ia menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan aspek keamanan data dalam setiap kebijakan e-Government.

Kesenjangan Digital Meskipun teknologi digital menawarkan berbagai kemudahan, tidak semua lapisan masyarakat di Kota Probolinggo memiliki akses yang setara terhadap teknologi ini. Kesenjangan digital, baik dari segi infrastruktur maupun kemampuan literasi digital, menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan e-Government yang inklusif. Pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memastikan bahwa teknologi dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur teknologi informasi yang merata dan pelatihan literasi digital menjadi hal yang sangat penting. Menurut Dr. Rosdiana (2021), ahli hukum administrasi, transformasi digital dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pemerintahan, tetapi pemerintah perlu menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaksetaraan akses terhadap teknologi di daerah-daerah terpencil. Ia menyarankan agar pemerintah meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan menyediakan pelatihan bagi masyarakat untuk memastikan bahwa semua pihak dapat berpartisipasi dalam sistem pemerintahan berbasis digital.

Regulasi yang Mendukung Salah satu tantangan dalam mengimplementasikan transformasi hukum administrasi di era digital adalah kebutuhan akan regulasi yang jelas dan memadai. Pemerintah perlu memastikan bahwa hukum administrasi yang ada dapat mengakomodasi perubahan yang dibawa oleh teknologi digital. Misalnya, hukum yang mengatur mengenai dokumen elektronik, tanda tangan digital, dan transaksi elektronik perlu diperbarui agar

sejalan dengan perkembangan teknologi yang terjadi. Di Kota Probolinggo, meskipun ada berbagai kebijakan yang sudah diterapkan untuk mendukung digitalisasi, namun perlu ada kajian lebih lanjut mengenai kesesuaian regulasi yang ada dengan dinamika perubahan teknologi.

Peningkatan Kualitas Layanan Publik Digitalisasi dalam pemerintahan memungkinkan peningkatan kualitas layanan publik, seperti pengurusan izin, pajak daerah, atau pengaduan masyarakat yang dapat dilakukan secara online. Sistem pelayanan publik berbasis digital juga dapat mengurangi antrean panjang dan birokrasi yang rumit. Dengan adanya aplikasi pelayanan publik di Kota Probolinggo, masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih mudah, cepat, dan transparan. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Bagir Manan (2018), pakar hukum tata negara, menjelaskan bahwa digitalisasi pemerintahan membuka peluang besar untuk memperbaiki kualitas layanan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Namun, ia juga memperingatkan bahwa teknologi digital harus digunakan dengan hati-hati, karena ada potensi risiko penyalahgunaan data pribadi dan pengawasan yang berlebihan yang dapat merugikan warga negara.

Partisipasi Publik dalam Pengawasan Salah satu peluang yang dimiliki oleh transformasi hukum administrasi di era digital adalah meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan pemerintahan. Masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi mengenai kebijakan, anggaran, dan proses administratif lainnya melalui platform digital yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini memungkinkan adanya pengawasan yang lebih partisipatif, di mana masyarakat dapat memberikan masukan, kritik, maupun laporan terkait pelayanan publik. Di Kota Probolinggo, penerapan aplikasi pengaduan berbasis digital memungkinkan masyarakat untuk melaporkan permasalahan secara langsung dan transparan.

Reformasi Birokrasi dan Efisiensi Transformasi digital berpotensi untuk meningkatkan efisiensi birokrasi. Proses yang sebelumnya memakan waktu lama, seperti pengajuan izin atau pembayaran pajak, dapat dilakukan secara cepat melalui sistem digital. Hal ini tidak hanya menghemat waktu tetapi juga mengurangi biaya operasional. Di Kota Probolinggo, implementasi sistem e-Government telah mengurangi interaksi tatap muka yang biasanya melibatkan banyak pihak, sehingga proses administratif menjadi lebih cepat dan efisien. M. Iqbal (2020), seorang praktisi hukum, menekankan bahwa digitalisasi administrasi pemerintahan harus disertai dengan penguatan sistem pengawasan yang lebih efektif. Menurutnya, meskipun teknologi dapat meningkatkan efisiensi, penting bagi masyarakat untuk memiliki kontrol terhadap bagaimana data mereka digunakan dan untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan dapat

dipertanggungjawabkan dengan jelas. Kesiapan Sumber Daya Manusia Salah satu aspek yang tak kalah penting dalam transformasi hukum administrasi di era digital adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM). Aparatur pemerintah harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup mengenai teknologi informasi agar dapat mengelola sistem digital dengan baik. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan SDM menjadi hal yang krusial untuk keberhasilan implementasi e-Government. Pemerintah Kota Probolinggo perlu memastikan bahwa pegawai negeri sipil (PNS) mereka terampil dalam menggunakan teknologi digital untuk menunjang tugas-tugas administratif.

Menurut M. Yahya Harahap (2020), ahli hukum administrasi, digitalisasi administrasi pemerintah memberikan kesempatan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi birokrasi, namun juga menyarankan agar sistem yang diterapkan memperhatikan perlindungan hak-hak individu dan tidak memperburuk ketimpangan sosial. Sementara itu, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Indonesia, mengemukakan bahwa penerapan e-Government dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa.

Dr. Andi Hamzah (2017), mengemukakan bahwa teknologi digital harus digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik, namun ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada efisiensi, tetapi juga memastikan sistem yang dibangun mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, penting bagi teknologi digital yang digunakan dalam pemerintahan untuk dapat diakses secara adil oleh seluruh warga negara, tanpa terkecuali. Kesimpulan dan Rekomendasi Transformasi hukum administrasi di era digital, khususnya di Kota Probolinggo, membawa banyak peluang untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan responsif. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital, perlindungan data pribadi, dan kesiapan SDM harus diatasi agar implementasi e-Government dapat berjalan optimal. Pemerintah Kota Probolinggo perlu melanjutkan pengembangan infrastruktur digital dan memperkuat regulasi yang mendukung penerapan teknologi dalam pelayanan publik. Dengan demikian, diharapkan digitalisasi administrasi pemerintahan dapat memberikan dampak positif dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan lebih transparan.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk menganalisis transformasi hukum administrasi di era digital, khususnya terkait dengan tantangan dan peluang bagi pemerintahan yang transparan di Kota Probolinggo, dapat

dijelaskan melalui komponen-komponen berikut, Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggali dan menganalisis fenomena transformasi hukum administrasi di era digital, khususnya terkait dengan implementasi e-Government di Kota Probolinggo. Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang tantangan dan peluang yang ada serta dampak terhadap pemerintahan yang transparan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan empiris,

Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis aspek hukum, regulasi, serta kebijakan yang terkait dengan transformasi hukum administrasi di era digital. Hal ini dilakukan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum administrasi, dan literatur lainnya yang relevan. Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis penerapan e-Government di Kota Probolinggo, melihat bagaimana teknologi memengaruhi transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Pendekatan ini lebih berfokus pada realitas yang terjadi di lapangan melalui data dan fakta yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.

Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai transformasi hukum administrasi di era digital, serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah Kota Probolinggo untuk mengoptimalkan penerapan e-Government demi tercapainya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, peneliti akan menyajikan hasil dari penelitian yang dilakukan mengenai transformasi hukum administrasi di era digital, dengan fokus pada tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pemerintah Kota Probolinggo dalam menciptakan pemerintahan yang transparan melalui penerapan e-Government. Hasil ini didapatkan dari wawancara dengan berbagai pihak terkait, observasi lapangan, serta analisis dokumen yang ada.

Hasil Penelitian

Tantangan dalam Transformasi Hukum Administrasi Digital di Kota Probolinggo

- a. Kesiapan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah Kota Probolinggo adalah keterbatasan infrastruktur teknologi dan kurangnya kapasitas SDM yang memadai dalam menerapkan e-Government secara maksimal. Meskipun

sebagian besar layanan publik telah beralih ke platform digital, banyak pegawai pemerintah yang belum memiliki keterampilan teknologi yang memadai untuk mengelola dan memanfaatkan sistem digital tersebut secara optimal.

- b. Keamanan dan Perlindungan Data Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pemerintah, meskipun telah ada kebijakan perlindungan data pribadi, penerapan kebijakan tersebut masih terbatas. Banyak warga yang merasa khawatir akan potensi kebocoran data pribadi mereka, terutama terkait dengan penggunaan aplikasi dan sistem online untuk layanan publik. Keamanan data masih menjadi masalah utama yang perlu ditangani dengan serius untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem e-Government.
- c. Ketidakmerataan Akses Teknologi Walaupun Kota Probolinggo telah mengimplementasikan berbagai platform digital, ketidakmerataan akses internet dan teknologi di daerah-daerah tertentu menjadi kendala. Beberapa daerah di Kota Probolinggo masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan berbasis digital karena terbatasnya jaringan internet dan perangkat teknologi yang memadai di masyarakat.

Peluang dalam Transformasi Hukum Administrasi Digital di Kota Probolinggo

- a. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Kota Probolinggo telah berhasil meningkatkan transparansi dalam administrasi publik melalui penerapan sistem e-Government. Layanan publik yang dapat diakses secara online mempermudah masyarakat untuk memonitor proses administratif secara langsung. Sistem pelaporan online dan portal transparansi anggaran menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa masyarakat bisa mengawasi pengelolaan dana publik dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
- b. Efisiensi dan Kecepatan Pelayanan Adanya sistem digital dalam pelayanan publik di Kota Probolinggo telah menghasilkan proses pelayanan yang lebih efisien dan cepat. Proses pengurusan berbagai izin seperti izin usaha, surat keterangan, dan layanan lainnya kini bisa dilakukan secara online, mengurangi waktu yang sebelumnya dihabiskan dalam antrian panjang atau proses birokrasi yang lambat. Sistem ini juga memungkinkan pemantauan secara real-time yang mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan atau praktik korupsi.
- c. Pemberdayaan Masyarakat Salah satu peluang besar dari penerapan e-Government adalah penguatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Platform digital yang tersedia memberi kesempatan bagi warga untuk berpartisipasi dalam musyawarah publik, memberikan masukan

terhadap kebijakan, serta melaporkan keluhan mengenai layanan publik. Hal ini meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, beberapa hal penting terkait dengan tantangan dan peluang dalam transformasi hukum administrasi di era digital di Kota Probolinggo dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Kesiapan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia Dalam menghadapi transformasi digital, kesiapan infrastruktur menjadi faktor kunci. Meskipun Kota Probolinggo telah memulai penerapan sistem e-Government, ketergantungan pada infrastruktur digital yang memadai masih menjadi kendala, terutama di beberapa daerah yang belum terjangkau internet dengan baik. Pemerintah perlu memastikan bahwa infrastruktur teknologi, termasuk jaringan internet dan perangkat keras, tersedia secara merata di seluruh wilayah kota. Selain itu, pengembangan SDM yang memiliki keterampilan teknologi juga sangat penting. Program pelatihan dan peningkatan kapasitas pegawai pemerintah terkait penggunaan teknologi dalam administrasi publik harus menjadi prioritas.

Keamanan dan Perlindungan Data Perlindungan data pribadi sangat krusial dalam implementasi e-Government. Meskipun Kota Probolinggo telah membuat kebijakan terkait perlindungan data, masih terdapat kekhawatiran di kalangan masyarakat mengenai keamanan data pribadi mereka. Kebocoran data atau penyalahgunaan informasi pribadi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan keamanan siber dengan menerapkan sistem enkripsi yang kuat dan melakukan audit berkala terhadap sistem yang digunakan. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka terkait data pribadi dan bagaimana pemerintah melindungi data mereka sangat penting untuk membangun kepercayaan.

Ketidakmerataan Akses Teknologi Meskipun transformasi digital diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, namun ketidakmerataan akses teknologi menjadi tantangan signifikan. Warga yang tinggal di daerah dengan keterbatasan akses internet atau perangkat teknologi sering kali kesulitan dalam memanfaatkan layanan publik yang berbasis digital. Pemerintah Kota Probolinggo perlu menciptakan solusi alternatif, seperti menyediakan titik akses internet publik gratis atau pelatihan penggunaan teknologi bagi masyarakat di daerah yang belum terjangkau. Ini akan membantu menciptakan pemerintahan yang inklusif.

Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Salah satu aspek positif dari penerapan e-Government di Kota Probolinggo adalah peningkatan transparansi. Masyarakat kini dapat memonitor proses pelayanan secara langsung, mengakses informasi tentang penggunaan anggaran daerah, dan melaporkan keluhan mereka dengan mudah. Hal ini membuat pemerintah lebih akuntabel terhadap publik. Dalam hal ini, platform digital seperti aplikasi pelaporan masyarakat dan portal transparansi anggaran dapat memperkuat partisipasi publik dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Efisiensi Pelayanan Publik Efisiensi menjadi salah satu keuntungan terbesar dari penerapan e-Government. Proses pengurusan izin atau dokumen penting dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tanpa melalui prosedur yang panjang. Hal ini tidak hanya menguntungkan masyarakat, tetapi juga membantu pemerintah mengurangi biaya operasional dan mempercepat proses administrasi. Namun, untuk mencapai efisiensi maksimal, pemerintah harus terus memperbaiki sistem digitalnya agar lebih mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat Penerapan e-Government juga membuka peluang bagi pemberdayaan masyarakat. Melalui platform digital, masyarakat dapat memberikan feedback terhadap layanan yang diterima, mengajukan saran untuk perbaikan, serta berpartisipasi dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan publik. Ini sejalan dengan prinsip pemerintahan yang inklusif, yang mengutamakan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam setiap aspek pengambilan keputusan.

Tabel

Aspek	Tantangan	Peluang
Kesiapan Infrastruktur dan SDM	- Keterbatasan infrastruktur digital di beberapa daerah	Pengembangan infrastruktur teknologi yang lebih baik di seluruh wilayah
	Kurangnya kapasitas SDM dalam mengelola teknologi administrasi publik.	Pelatihan dan peningkatan keterampilan SDM di bidang teknologi
	Kekhawatiran mengenai kebocoran data pribadi	Peningkatan keamanan sistem digital dan perlindungan data pribadi

Keamanan dan Perlindungan Data	Kurangnya pemahaman tentang kebijakan perlindungan data di kalangan masyarakat	Transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem e-Government
Ketidakmerataan Akses Teknologi	Ketidakmerataan akses internet dan perangkat teknologi di beberapa daerah.	Solusi alternatif untuk akses teknologi, seperti Wi-Fi publik gratis
	Masyarakat di daerah tertentu kesulitan mengakses layanan digital	Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan penggunaan teknologi.
Transparansi dan Akuntabilitas	Tantangan dalam penerapan pengawasan sistem digital secara menyeluruh	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan transparansi melalui platform digital yang mudah diakses • Meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan
Efisiensi Pelayanan Publik	Beberapa layanan masih mengalami kendala dalam implementasi e-Government.	Efisiensi waktu dan biaya dalam pengurusan izin dan layanan publik lainnya
	Proses administrasi di beberapa sektor masih memerlukan perbaikan sistem	Mempercepat pelayanan publik dengan mengurangi birokrasi
Pemberdayaan Masyarakat	Masyarakat kurang familiar dengan partisipasi dalam platform digital	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan • Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan layanan publik.

Tantangan mencakup masalah yang dihadapi oleh pemerintah Kota Probolinggo dalam proses digitalisasi administrasi publik, seperti kurangnya infrastruktur yang memadai, masalah keamanan data, ketidakmerataan akses

teknologi, dan kendala dalam transparansi dan efisiensi pelayanan. Peluang mencerminkan potensi positif dari penerapan e-Government, seperti peningkatan transparansi, efisiensi dalam pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta kesempatan untuk memperbaiki infrastruktur dan pengelolaan data pribadi secara lebih baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, transformasi hukum administrasi di era digital di Kota Probolinggo menunjukkan berbagai tantangan dan peluang yang perlu dihadapi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola sistem digital, serta masalah terkait keamanan dan perlindungan data pribadi. Selain itu, ketidakmerataan akses teknologi di berbagai wilayah juga menjadi penghalang bagi sebagian masyarakat untuk memanfaatkan layanan publik digital dengan optimal.

Namun, meskipun ada tantangan, peluang besar juga muncul dari penerapan e-Government di Kota Probolinggo. Di antaranya adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan melalui akses terbuka terhadap informasi dan layanan publik secara digital. Selain itu, efisiensi dalam pelayanan publik meningkat, dengan pengurangan waktu dan biaya yang sebelumnya diperlukan untuk proses administratif konvensional. Pemberdayaan masyarakat juga menjadi salah satu peluang penting, di mana warga dapat lebih aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan pemerintah.

Secara keseluruhan, transformasi digital dalam administrasi publik di Kota Probolinggo menawarkan banyak potensi positif, namun memerlukan perhatian khusus terhadap pengembangan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan data pribadi. Pemerintah Kota Probolinggo perlu terus mengembangkan sistem yang ada, memastikan pemerataan akses teknologi, dan memperkuat regulasi untuk mendukung keberlanjutan transformasi ini. Dengan demikian, tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dapat terwujud dengan lebih efektif.

Transformasi hukum administrasi di era digital memberikan tantangan dan peluang yang signifikan bagi pemerintah Kota Probolinggo dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan efisien. Walaupun ada tantangan terkait infrastruktur, SDM, dan keamanan data, penerapan e-Government menawarkan peluang besar untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Pemerintah Kota Probolinggo perlu mengatasi tantangan tersebut

dengan memperkuat infrastruktur teknologi, memperbaiki regulasi perlindungan data, serta memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan digital secara adil dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton, M. (2021). *Hukum Administrasi dan Era Digital*. Jakarta: Penerbit Alfabeta.
- Arif, M. (2015). *Reformasi Administrasi Publik di Era Digital*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asshiddiqie, J. (2016). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Era Digital*. Jakarta: Rajawali Press.
- Boddy, D., Boonstra, A., & Kennedy, G. (2018). *Management Information Systems: A Managerial Perspective*. Pearson Education.
- Dufresne, A., & Dupuis, M. (2019). *Digital Government and Public Services: Challenges in the Digital Age*. Routledge.
- Fitriani, Y., & Suryaningsih, N. (2021). Tantangan dan Peluang dalam Penerapan e-Government di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 45-60.
- Gunawan, S., & Wiratama, E. (2020). Pengaruh Digitalisasi terhadap Layanan Publik di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 9(3), 124-137.
- Hamzah, A. (2017). *Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi Pemerintahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Harahap, M. (2020). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Harkrisnowo, H. (2018). *Hukum Administrasi Negara dan Digitalisasi*. Yogyakarta: UGM Press.
- Indrawati, S. M. (2021). *Pemerintahan Digital dan Akuntabilitas Keuangan Negara*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Iqbal, M. (2020). *Pembangunan E-Government dan Perlindungan Data Pribadi*. Jakarta: Prenadamedia.
- Kadariusman, P. (2020). *E-Government dan Pelayanan Publik yang Efektif*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kusnadi, A., & Lestari, I. (2016). *e-Government sebagai Solusi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan*. Jakarta: Pustaka Bangsa.
- Laporan Tahunan Pemerintah Kota Probolinggo (2023).

- Lee, M. K., & Lee, J. K. (2020). Privacy, Transparency, and Trust in e-Government Services: Evidence from South Korea. *Government Information Quarterly*, 37(4), 101473.
- Manan, B. (2018). *Teknologi Informasi dalam Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Pratomo, T. S. (2019). *Hukum Administrasi Publik: Implementasi dan Tantangan Digitalisasi*. Bandung: Alumni.
- Rosdiana, D. (2021). *Membangun Pemerintahan Transparan di Era Digital*. Jakarta: Kencana.
- Rosyadi, I. (2022). *Digitalisasi dan Akuntabilitas dalam Pemerintahan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.